



INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) DI JAWA TENGAH 2014

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH 2014 SEBESAR 77,44 DALAM SKALA 0 SAMPAI 100, ANGKA INI NAIK 16,60 POIN DIBANDINGKAN DENGAN IDI JAWA TENGAH 2013 SEBESAR 60,84.

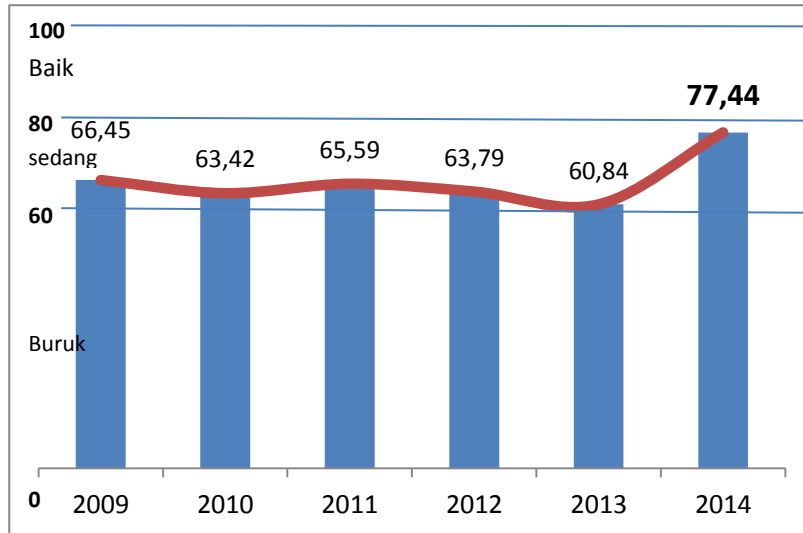
- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Tengah 2014 sebesar 77,44 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini naik 16,60 poin dibandingkan dengan IDI 2013 sebesar 60,84. Kinerja demokrasi Jawa Tengah masih berada pada kategori “sedang”. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).
- Kenaikan IDI dari 2013-2014 dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yakni Kebebasan Sipil naik 8,69 poin (dari 79,18 menjadi 87,87), Hak-Hak Politik yang naik 20,79 poin (dari 46,29 menjadi 67,08), dan Lembaga-lembaga Demokrasi yang naik 19,88 poin (dari 60,89 menjadi 80,77).
- Metodologi pengumpulan data IDI terdiri dari 4 sumber data yaitu : (1) *review* surat kabar lokal, (2) *review* dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

1. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Tengah 2014

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Tengah 2014 sebesar **77,44** dari skala 0 sampai 100, angka ini naik **16,60** poin dibandingkan dengan IDI Jawa Tengah 2013 sebesar 60,84. Meskipun mengalami peningkatan, tingkat demokrasi di Jawa Tengah secara umum masih dalam kategori sedang.

Perubahan IDI dari 2009 hingga 2014 mengalami fluktuasi (2009 sebesar 66,45; 2010 sebesar 63,42; 2011 sebesar 65,59; 2012 sebesar 63,79; 2013 sebesar 60,84; dan 2014 sebesar 77,44). Nilai IDI 2014 merupakan capaian tertinggi selama 6 tahun penghitungan IDI (2009-2014). Fluktuatifnya angka IDI adalah cermin dinamika situasi demokrasi di Jawa Tengah. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi regional. Karena IDI disusun berdasarkan *evidence based* (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

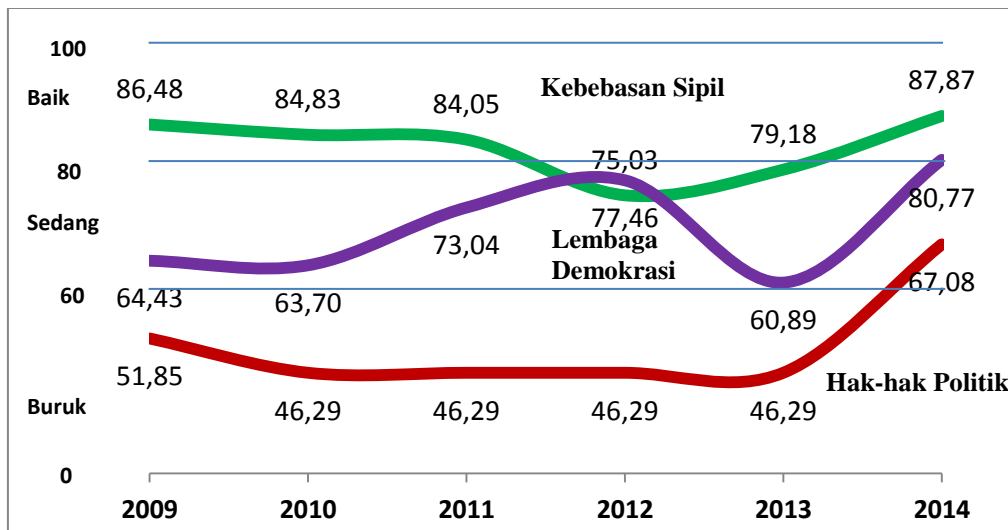
Grafik 1. Perkembangan IDI di Jawa Tengah, 2009-2014



2. Perkembangan Indeks Aspek IDI di Jawa Tengah

Angka IDI 2014 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil sebesar 87,87; aspek Hak-hak Politik sebesar 67,08; dan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 80,77.

Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI di Jawa Tengah, 2009-2014



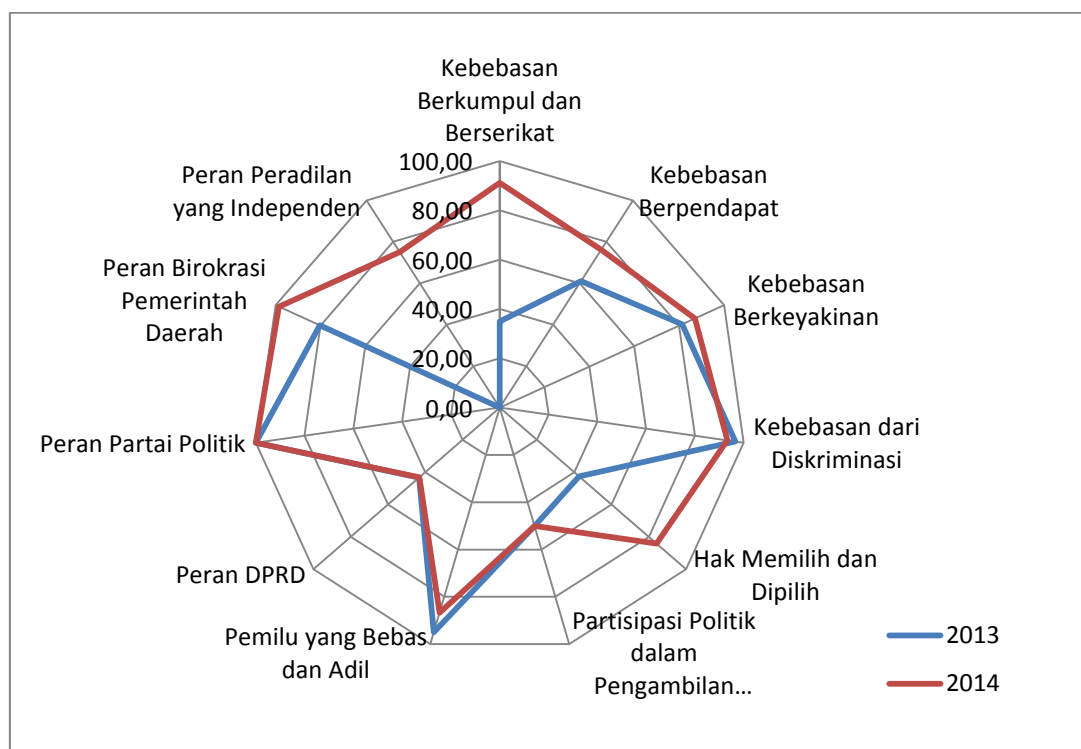
Nilai indeks dalam tiga aspek demokrasi yang diukur pada 2014 mengalami peningkatan dibandingkan 2013. Indeks aspek Hak-hak politik mengalami peningkatan terbesar 20,79 poin sehingga mendongkrak nilai IDI 2014. Sementara nilai kebebasan sipil dan lembaga demokrasi mengalami peningkatan berturut-turut 8,69 dan 19,88 poin. Peningkatan nilai indeks menyebabkan pola sebaran kategori berubah dengan tahun pengukuran sebelumnya, yaitu kebebasan sipil dan lembaga demokrasi secara umum dari kategori “sedang” menjadi “baik”, dan hak-hak politik berubah dari “buruk” menjadi “sedang”. Perlu menjadi perhatian, pada aspek hak-hak politik kendati terdapat perbaikan pada hak memilih dan dipilih namun masih terdapat kecenderungan penyampaian aspirasi dalam bentuk

demonstrasi yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan seperti merusak, memblokir, membakar, dan melakukan penyegelan terhadap kantor-kantor pemerintah. Sementara dari aspek lembaga demokrasi peran DPRD masih cenderung rendah.

3. Perkembangan Indeks Variabel IDI di Jawa Tengah

Variabel pada IDI 2014 terdapat enam variabel yang mengalami peningkatan indeks, empat variabel mengalami penurunan dan satu variabel yang tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2013. Dari enam variabel yang mengalami kenaikan, tiga diantaranya meningkat cukup berarti. Kenaikan terbesar pada indeks variabel peran peradilan yang independen. Grafik 3 memperlihatkan variabel peran peradilan yang independen meningkat dari kategori buruk menjadi sedang, dari 00,00 pada 2013 menjadi 75,00 pada 2014. Indeks variabel lain yang meningkat cukup berarti diantaranya kebebasan berkumpul dan berserikat (dari 35,00 pada 2013 menjadi 91,25 pada 2014) dan hak memilih dan dipilih (dari 42,59 pada 2013 menjadi 84,16 pada 2014). Perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.

Grafik 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI di Jawa Tengah, 2013-2014



4. Perkembangan Skor Indikator IDI di Jawa Tengah

Indikator pada IDI 2014 terdapat 17 indikator mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80) yaitu indikator 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 23, 24, 25, 26, dan 28 (lihat Tabel 2 angka yang bercetak tebal). Pada tahun 2014 masih terdapat masalah kronis yakni kinerja demokrasi “buruk” (skor di bawah 60). Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan, alokasi anggaran pendidikan/kesehatan, perda yang merupakan inisiatif DPRD,

rekomendasi DPRD kepada eksekutif, dan keputusan hakim yang kontroversial. Oleh karena itu, indikator tersebut memerlukan perhatian khusus agar nilainya dapat membaik.

5. Penjelasan Teknis

Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), United Nations Development Programme (UNDP) dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua *stakeholder*, tidak hanya pemerintah saja.

Komponen Penghitungan IDI 2009 - 2014

Aspek	Variabel	Indikator *)
1. Kebebasan Sipil	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	2 indikator
	2. Kebebasan Berpendapat	2 indikator
	3. Kebebasan Berkeyakinan	3 indikator
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	3 indikator
2. Hak-Hak Politik	5. Hak Memilih dan Dipilih	5 indikator
	6. Partisipasi Politik dlm Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	2 indikator
3. Institusi Demokratis	7. Pemilu yang Bebas dan Adil	2 indikator
	8. Peran DPRD	3 indikator
	9. Peran Partai Politik	2 indikator
	10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	2 indikator
	11. Peradilan yang Independen	2 indikator

Catatan: *) = rincian indikator dapat dilihat pada Tabel 2

Pengumpulan data IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui *focus group discussion* (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya

Dari sisi penghitungan Indeks, IDI harus melalui tiga tahapan proses yakni *pertama*, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator; *kedua*, menghitung indeks provinsi; dan *ketiga*, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Indeks masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional.

Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

7. Tabel-tabel

Tabel 1. Perkembangan Indeks Variabel IDI di Jawa Tengah, 2013-2014

No	Nama Variabel	2013	2014	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	35.00	91.25	56.25
2	Kebebasan Berpendapat	61.09	76.12	15.03
3	Kebebasan Berkeyakinan	81.31	87.06	5.75
4	Kebebasan dari Diskriminasi	96.53	93.23	-3.30
5	Hak Memilih dan Dipilih	42.59	84.16	41.57
6	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	50.00	50.00	0.00
7	Pemilu yang Bebas dan Adil	94.94	86.71	-8.23
8	Peran DPRD	43.32	43.22	-0.10
9	Peran Partai Politik	100.00	99.96	-0.04
10	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	80.30	98.48	18.18
11	Peran Peradilan yang Independen	0.00	75.00	75.00

Tabel 2. Perkembangan Skor Indikator IDI di Jawa Tengah, 2013 dan 2014

No (1)	Indikator (2)	2013 (3)	2014 (4)	Selisih (5)
Kebebasan Sipil				
1	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	40,00	90,00	50,00
2	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	0,00	100,00	100,00
3	Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	73,33	73,33	0,00
4	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	0,00	90,00	90,00
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	91,30	91,30	0,00
6	Tindakan/ Pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	100,00	87,50	-12,50
7	Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama	30,00	70,00	40,00
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	100,00	100,00	0,00
9	Tindakan/ Pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender dst	87,50	87,50	0,00
10	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender	100,00	90,00	-10,00
Hak-Hak Politik				
11	Hak memilih atau dipilih terhambat	34,62	92,95	58,33
12	Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	50,00	60,00	10,00
13	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	30,00	89,65	59,65
14	Voters turnout	71,26	73,24	1,98
15	% Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi	70,00	76,67	6,67
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	0,00	0,00	0,00
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	100,00	100,00	0,00
Lembaga Demokrasi				
18	Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	100,00	100,00	0,00
19	Kecurangan dalam penghitungan suara	89,87	73,42	-16,45
20	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	54,97	54,81	-0,16
21	Perda yang merupakan inisiatif DPRD	41,18	41,18	0,00
22	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif	3,57	3,57	0,00
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu	100,00	100,00	0,00
24	% perempuan pengurus partai politik	100,00	99,64	-0,36
25	Penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan parpol	90,90	100,00	9,10
26	Keterlibatan PNS dalam kegiatan parpol peserta pemilu	69,70	96,97	27,27
27	Keputusan hakim yang kontroversial	0,00	50,00	50,00
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	0,00	100,00	100,00